



**Universitas Negeri Surabaya**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi S1 Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan**

Kode Dokumen

# **RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

		CPMK	Minggu Ke															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		CPMK-1	✓	✓														
Deskripsi Singkat MK		CPMK-2			✓	✓	✓											
		CPMK-3							✓	✓	✓							✓
		CPMK-4										✓	✓		✓			✓
		CPMK-5						✓						✓				
		CPMK-6																✓
Pustaka	Utama :	Perkuliahan Antikorupsi berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Kuliah ini memberikan bekal kepada mahasiswa untuk mengerti tentang korupsi, tindakan anti korupsi, penyebab korupsi, akibat korupsi, hukum, bentuk-bentuk korupsi baik yang terjadi di Indonesia maupun negara-negara lain, pencegahan korupsi, dan melakukan investigasi atas korupsi yang terjadi di masyarakat (sebagai studi kasus).																
	Pendukung :	1. Andi Hamzah. 2005. Pemberantasan Korupsi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2. Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI 3. Eko Handoyo, 2013, Pendidikan Anti Korupsi, Semarang : LP3M Universitas Negeri Semarang 4. Adami Chazawi,2015, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa 5. Baharudin Lopa. 2001. Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum. Jakarta: Penerbit Kompas. 6. Dharmawan (ed). 2004. Surga Para Koruptor. Jakarta: Penerbit Kompas. 7. . Evi Hartati. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.Suyatno. 2005. Korupsi Kolusi Nepotisme. Jakarta: CV. Muliasari. 8. Ibrahim, I S, dan Iriantara, Y. 2003. Melawan Korupsi di Sektor Publik. Bandung: Sawarung. 9. Kemenristekdikti, 2018. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, edisi revisi. 10.KPK. buku-buku dapat cek di ACLC: aclc.kpk.go.id 11.Suyatno. 2005. Korupsi Kolusi Nepotisme. Jakarta: CV. Muliasari. 12.Wahyudi Kumorotomo. 2005. Akuntabilitas Birokrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 13.Wijayanto, Ridwan Zachrie (ed), Korupsi Mengorupsi Indonesia : Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan , PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009. 14.UU No. 30 th. 2002 15.UU No. 18 th. 2003 16.PP no. 71 th. 2000 17.Keppres No. 59 th. 2004 UN Convention against Corruption 2003																
Dosen Pengampu		Dr. Oksiana Jatiningsih, M.Si. Budi Santosa, S.Pd.I., M.S.I. Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, S.H., M.H.																
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian				Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu ]				Materi Pembelajaran [ Pustaka ]	Bobot Penilaian (%)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)											
1	Menjelaskan konsep korupsi, perilaku korupatif, dan bentuk-bentuk kegiatan korupsi, serta integritas anti korupsi.	Mahasiswa dapat menjelaskan ciri-ciri dan contoh perilaku korupatif	<b>Kriteria:</b> Permaparan dan Diskusi  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	ceramah, diskusi 2 X 50														
2	Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, korupsi dan integritas, nilai dan prinsip antikorupsi, sejarah korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia	Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan pengertian, korupsi dan integritas, nilai dan prinsip antikorupsi, sejarah korupsi dan pemberantasan korupsi di Indonesia	<b>Kriteria:</b> Partisipasi dan tugas  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Contextual Instruction dalam bentuk: - Ceramah - Studi kasus TM= 2 x (2x50") Tugas melalui kelompok BT=1x(2x60") Tugas individual melalui e-learning. BM=2x(2x60") 2 X 50														

3	Mahasiswa mampu menjelaskan faktor penyebab korupsi dan dampak korupsi	Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan penyebab korupsi, dampak masif korupsi, dan analisis kasus dalam investigasi lapangan	<b>Kriteria:</b> Invididu  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Contextual Instruction dalam bentuk: · Ceramah · Studi kasus 2 X 50		<b>Materi:</b> Serba Serbi Pencegahan dan Penanganan Korupsi di Indonesia <b>Pustaka:</b> KPK. buku-buku dapat cek di ACLC: <a href="http://aclc.kpk.go.id">aclc.kpk.go.id</a>	5%
4	Menjelaskan penyebab korupsi, dampak masif korupsi, dan analisis kasus dalam investigasi lapangan.	Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan penyebab korupsi, dampak masif korupsi, dan analisis kasus dalam investigasi lapangan	<b>Kriteria:</b> Invididu: Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan penyebab korupsi, dampak masif korupsi, dan analisis kasus dalam investigasi lapangan  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Contextual Instruction dalam bentuk: · Ceramah · Studi kasus 2 X 50		<b>Materi:</b> Serba Serbi Pencegahan dan Penanganan Korupsi di Indonesia <b>Pustaka:</b> KPK. buku-buku dapat cek di ACLC: <a href="http://aclc.kpk.go.id">aclc.kpk.go.id</a>	5%
5	Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai bentuk upaya pemberantasan korupsi.	Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan berbagai bentuk upaya pemberantasan korupsi	<b>Kriteria:</b> Individu: Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan berbagai bentuk upaya pemberantasan korupsi  <b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Portofolio	Contextual Instruction dalam bentuk: · Ceramah · Studi kasus 2 X 50		<b>Materi:</b> Pemberantasan Korupsi di Indonesia <b>Pustaka:</b> Wijayanto, Ridwan Zachrie (ed), Korupsi Mengorupsi Indonesia : Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan , PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.	5%
6	Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai bentuk tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan	Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan berbagai bentuk tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan	<b>Kriteria:</b> Individu: Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan berbagai bentuk tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Contextual Instruction dalam bentuk: · Ceramah · Studi kasus · Kuliah Umum 2 X 50		<b>Materi:</b> UU TIPIKOR <b>Pustaka:</b> UU No. 30 th. 2002	5%
7	Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai bentuk tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan	Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan berbagai bentuk tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan	<b>Kriteria:</b> Invidiu  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Contextual Instruction dalam bentuk: · Ceramah · Studi kasus · Kuliah Umum 2 X 50		<b>Materi:</b> UU TIPIKOR <b>Pustaka:</b> UU No. 30 th. 2002	5%
8	UTS	Ketepatan menjawab dan kemampuan menunjukan aspek-aspek softskill yang dinilai	<b>Kriteria:</b> Individu  <b>Bentuk Penilaian :</b> Tes	tugas projek: merancang aktivitas (TOR) untuk kegiatan pencegahan korupsi. 2 X 50		<b>Materi:</b> Korupsi dan koruptif <b>Pustaka:</b> Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI	15%
9	Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai bentuk gerakan kerja sama dan instrumen pencegahan korupsi pada tingkat nasional dan internasional	Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan berbagai bentuk gerakan kerja sama dan instrumen pencegahan korupsi pada tingkat nasional dan internasional	<b>Kriteria:</b> Individu: Strategi mencegah korupsi  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Contextual Instruction dalam bentuk: · Ceramah · Studi kasus 2 X 50		<b>Materi:</b> Pencegahan korupsi <b>Pustaka:</b> Eko Handoyo, 2013, Pendidikan Anti Korupsi, Semarang : LP3M Universitas Negeri Semarang	5%

10	Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai bentuk gerakan kerja sama dan instrumen pencegahan korupsi pada tingkat nasional dan internasional	Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan berbagai bentuk gerakan kerja sama dan instrumen pencegahan korupsi pada tingkat nasional dan internasional	<b>Kriteria:</b> Individu  <b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Portofolio	Contextual Instruction dalam bentuk: · Ceramah · Studi kasus 2 X 50		<b>Materi:</b> kebijakan anti korupsi <b>Pustaka:</b> Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI	5%
11	Mahasiswa dapat menjelaskan materi kewenangan dan rahasia profesi terkait dengan tindak pidana korupsi.	Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan materi kewenangan dan rahasia profesi terkait dengan tindak pidana korupsi.	<b>Kriteria:</b> Individu  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Contextual Instruction dalam bentuk: · Ceramah Studi kasus 2 X 50		<b>Materi:</b> instrumen antikorupsi <b>Pustaka:</b> Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI	5%
12	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang harta benda koruptor dan pengembaliannya kepada negara.	Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan tentang harta benda koruptor dan pengembaliannya kepada negara.	<b>Kriteria:</b> Individu  <b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Portofolio	Contextual Instruction dalam bentuk: · Ceramah · Studi kasus 2 X 50		<b>Materi:</b> Instrumen pencegahan korupsi <b>Pustaka:</b> Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI	5%
13	Mahasiswa dapat menjelaskan persoalan peradilan dan gugatan dalam tindak pidana korupsi.	Ketepatan dan kesesuaian dalam menjelaskan peradilan korupsi	<b>Kriteria:</b> Individu  <b>Bentuk Penilaian :</b> Penilaian Portofolio	Metode diskusi 2 X 50		<b>Materi:</b> Penegakkan Hukum Anti Korupsi di Indonesia <b>Pustaka:</b> Adami Chazawi,2015, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa	5%
14	Mahasiswa dapat merencanakan dan melaksanakan aksi pencegahan korupsi di masyarakat	Mahasiswa dapat melaksanakan aksi pencegahan anti korupsi sesuai perencanaan yang dibuat	<b>Kriteria:</b> kelompok: Mahasiswa dapat melaksanakan aksi pencegahan anti korupsi sesuai perencanaan yang dibuat  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Projek Kewarganegaraan 2 X 50		<b>Materi:</b> Surga Koruptor <b>Pustaka:</b> Dharmawan (ed). 2004. Surga Para Koruptor. Jakarta: Penerbit Kompas.	5%
15	Mahasiswa mampu menjelaskan etika dalam layanan publik dan pencegahan korupsi dalam layanan publik	Ketepatan dan kesesuaian dalam memahami korupsi korupsi dalam layanan publik	<b>Kriteria:</b> Individu  <b>Bentuk Penilaian :</b> Aktifitas Partisipatif	Contextual Instruction dalam bentuk: · Ceramah · Studi kasus 2 X 50		<b>Materi:</b> Kebijakan antikorupsi <b>Pustaka:</b> Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI	5%

16	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Korupsi secara konseptual dan praktik	Menganalisis Korupsi secara konseptual dan praktik	<b>Kriteria:</b> mampu menjelaskan dan menganalisis Korupsi secara konseptual dan praktik  <b>Bentuk Penilaian :</b> Tes	UAS: presentasi strategi mengatasi korupsi 2 x 50'		<b>Materi:</b> Kejahatan korupsi <b>Pustaka:</b> <i>Baharudin Lopa. 2001. Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Penerbit Kompas.</i>	15%
----	--	--	--	---	--	---	-----

#### Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipatif	50%
2.	Penilaian Portofolio	20%
3.	Tes	30%
		100%

#### Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata Kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 26 November 2024

Koordinator Program Studi S1  
Pendidikan Pancasila Dan  
Kewarganegaraan



LISTYANINGSIH  
NIDN 0020027505

**UPM** Program Studi S1  
Pendidikan Pancasila Dan  
Kewarganegaraan



NIDN 0023049109

